RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

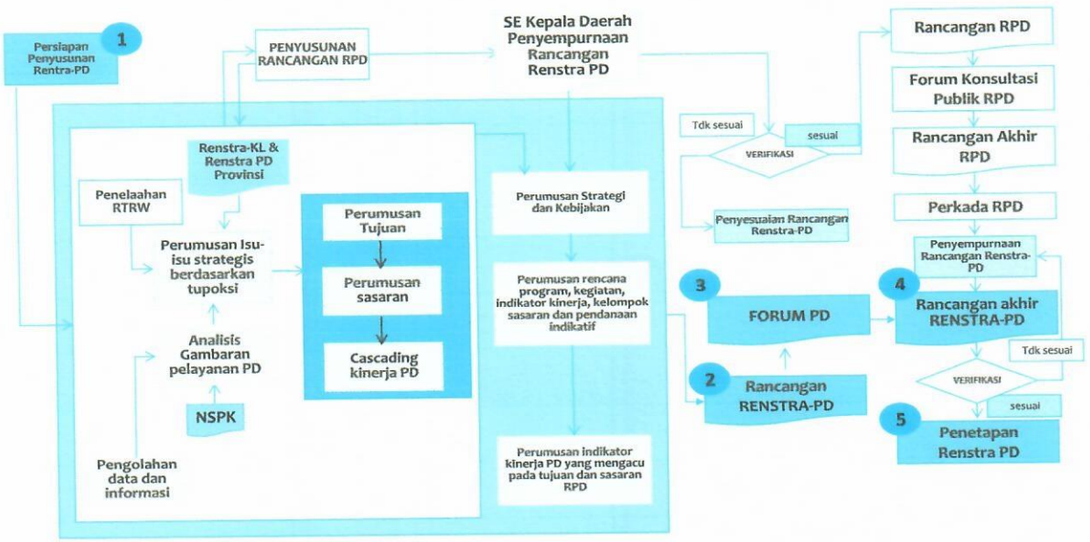
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alur berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
32. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
40. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

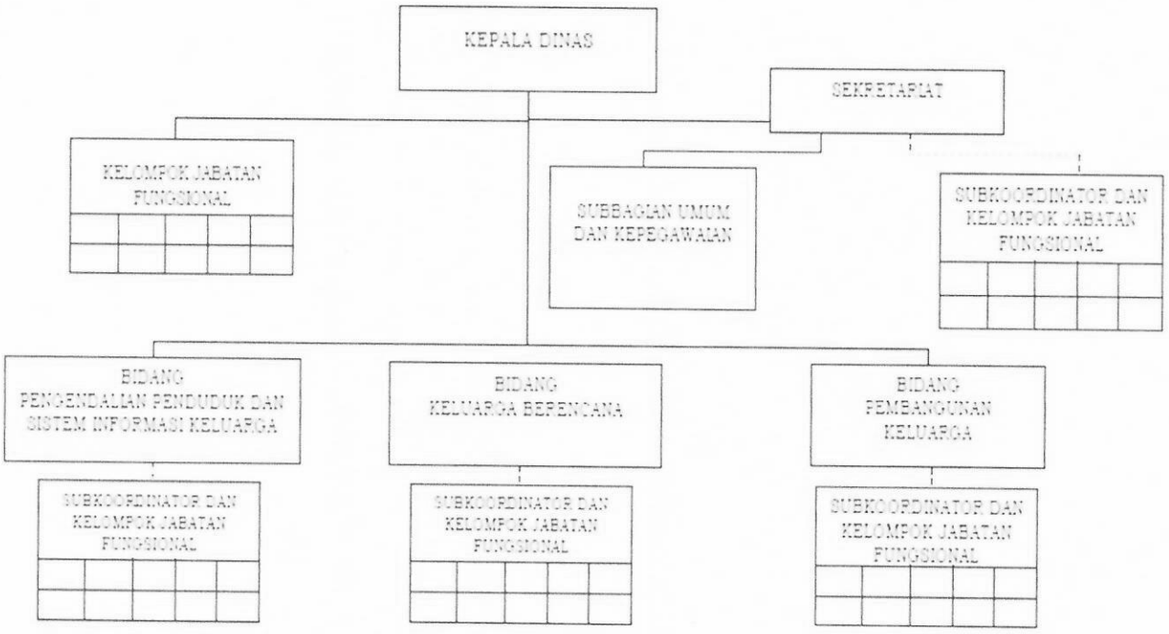
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Bagan Organisasi Dinas PPKB

I. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

II. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas :

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis program pengendalian penduduk;
4. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
5. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan progam tentang pengendalian penduduk;
6. Perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
7. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
8. Pemantauan atas progam dan kegiatan pengendalian penduduk;
9. Perumusan kebijakan teknis yang di integrasikan melalui progam kependudukan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menganalisis dan menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana meliputi penggerakan, Penyediaan alokon pada pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pasca pelayanan, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pada program keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pendukung program keluarga berencana;
6. Penyusunan strategi program rintisan untuk pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus;
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
8. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah pada program pembinaan KB;
9. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Pembangunan Keluarga

Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi akseptor KB. Bidang Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

5. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan KS;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan pendayagunaan fungsional PKB dari pusat (BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan s.d Tahun 2022

No	Pangkat/Golongan	Pemda	Penyuluh KB
1.	Pengatur Muda/IIa	-	-
2.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	-	-
3.	Pengatur/IIc	2	-
4.	Pengatur Tk.I/IId	5	-
5.	Penata Muda/IIIa	3	2
6.	Penata Muda Tk.I/IIIb	1	22
7.	Penata/IIIc	3	11
8.	Penata Tk.I/IIId	12	11
9.	Pembina/IVa	4	-
10.	Pembina Tk.I/IVb	-	8
11.	Pembina Utama Muda/IVc	1	4
Jumlah		**31**	**58**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk masih belum mencukupi dari segi jumlah

pegawai, dan dengan beban kerja yang semakin tinggi, jumlah pegawai semakin tahun makin mengalami penurunan.

Dari jumlah PKB/PLKB yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk sejumlah 58, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 284 desa, setiap 1 PKB/PLKB rata-rata mendapatkan 2 s/d 3 desa/wilayah. Di samping itu jumlah staf yang ada, tidak mencukupi untuk beban pekerjaan yang semakin tinggi di Dinas PPKB.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas PPKB telah didukung dengan beberapa sarana dan prasarana diantaranya :

Tabel 2.3
Tabel Sarana Prasarana s.d Tahun 2022

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi (Baik, Lengkap, Cukup, Kurang)
	Sarana Transportasi :			
1	Kendaraaan operasional roda 4	Unit	6	Baik
		Unit	3	Kurang Baik
2	Kendaraan operasional roda 2	Unit	81	Kurang Baik
		Unit	5	Baik
	Sarana bangunan gedung:			
3	Bangunan kantor	Lokasi	1	Baik
4	Bangunan Balai Penyuluh KB	Lokasi	18	Baik
	Sarana alat-alat kantor :			
5	Komputer/PC Dinas	Unit	15	Baik
6	Komputer/PC Balai Penyuluh KB	Unit	13	Cukup
7	Laptop Dinas	Unit	14	Baik
8	Laptop Balai Penyuluh KB	Unit	27	Cukup
9	LCD	Unit	18	Baik
10	AC Split	Unit	10	Baik
11	Sound System Dinas	Unit	2	Baik
12	Sound System Balai Penyuluh KB	Unit	7	Baik

Kelengkapan Sarana dan Prasarana ini diperuntukkan bagi kebutuhan bekerja para personil Dinas PPKB yang ada di sekretariat maupun dilapangan, penggunaan sarana prasarana khususnya laptop diperuntukkan bagi petugas lapangan, dengan harapan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan para penyuluh KB sehingga aplikasi kegiatan baik dari segi administrasi maupun pelaporan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Adapun sumber daya yang mendukung kinerja pegawai Dinas PPKB dan dibantu oleh beberapa Fasilitas Kesehatan (Faskes) antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani KB s.d Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	BAGOR	3 FASKES
2	BARON	1 FASKES
3	BERBEK	1 FASKES
4	GONDANG	2 FASKES
5	JATIKALEN	1 FASKES
6	KERTOSONO	3 FASKES
7	LENGKONG	1 FASKES
8	LOCERET	3 FASKES
9	NGANJUK	7 FASKES
10	NGETOS	1 FASKES
11	NGLUYU	1 FASKES
12	NGRONGGOT	1 FASKES
13	PACE	2 FASKES
14	PATIANROWO	1 FASKES
15	PRAMBON	2 FASKES
16	REJOSO	2 FASKES
17	SAWAHAN	1 FASKES
18	SUKOMORO	3 FASKES
19	TANJUNGANOM	1 FASKES
20	WILANGAN	1 FASKES
JUMLAH		**38 FASKES**

Tabel 2.5

Tabel Nama dan Alamat Fasilitas Kesehatan
yang Melayani KB s.d Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NAMA FASKES KB	ALAMAT
1	Bagor	PUSKESMAS BAGOR	Desa Petak
2	Bagor	KLINIK SHAFIRA N	Selorejo Bagor
3	Bagor	SAHABAT KELUARGA	Jl. Raya Madiun-Kedondong
4	Baron	PUSKESMAS BARON	Desa Baron
5	Berbek	PUSKESMAS BERBEK	Jl. Supeno
6	Gondang	PUSKESMAS GONDANG	Jl Pahlawan No. 90 Kec. Gondang
7	Gondang	ADI AMERTA	Jl. Raya Balonggebang-Lengkong
8	Jatikalen	PUSKESMAS JATIKALEN	Desa Jatikalen
9	Kertosono	RSUD KERTOSONO	Kertosono
10	Kertosono	PUSKESMAS KERTOSONO	Jl. Anosopati 4A
11	Kertosono	RI PKU MUHAMMADIYAH	Jl Raya LB Kuning No 68 Kertosono
12	Lengkong	PUSKESMAS LENGKONG	Desa Lengkong
13	Loceret	PUSKESMAS LOCERET	Desa Loceret
14	Loceret	RSIA ALF SUBTIN	Jl. Anjuk Ladang No. 21
15	Loceret	Klinik Pratama Rawat Inap "SHIFA HUSADA"	Desa Nglaban RT/RW 002 Kec. Loceret
16	Nganjuk	PKBRS	Jl. DR. Sutomo NO.62
17	Nganjuk	RS. BHAYANGKARA	Nganjuk
18	Nganjuk	RS ISLAM	Jl. Imam Bonjol No. 2A
19	Nganjuk	PUSKESMAS NGANJUK	Jl. Musi III/63
20	Nganjuk	POSKES 05.10.06	Jl. Pang Sudirman
21	Nganjuk	KLINIK POLRES	Jl. Gatot Subroto No.116
22	Nganjuk	Praktek Dokter Mandiri "Nerry"	Jl. Mastrip
23	Ngetos	PUSKESMAS NGETOS	Desa Ngetos
24	Ngluyu	PUSKESMAS NGLUYU	Desa Ngluyu
25	Ngronggot	PUSKESMAS NGRONGGOT	Desa Ngronggot
26	Pace	PUSKESMAS PACE	Desa Cerme

NO	KECAMATAN	NAMA FASKES KB	ALAMAT
27	Pace	FIFA HUSADA	Jl. Raya Kediri-Nganjuk
28	Patianrowo	PUSKESMAS PATIANROWO	Jl. Raya Ngepung-Kec. Patianrowo
29	Prambon	PUSKESMAS PRAMBON	Desa Sanggrahan
30	Prambon	FLAMBOYAN	Sanggrahan, Prambon
31	Rejoso	PUSKESMAS REJOSO	Desa Rejoso
32	Rejoso	dr TIEN FARIDAYANI (KLINIK KELUARGA KITA)	Jl. Bojonegoro 16 Talang Rejoso
33	Sawahan	PUSKESMAS SAWAHAN	Desa Sidorejo
34	Sukomoro	PUSKESMAS SUKOMORO	Kel. Sukomoro
35	Sukomoro	dr. NIHA AINITA	Desa Putren Kec. Sukomoro
36	Sukomoro	Klinik Permata Hati	Desa Putren Kec. Sukomoro
37	Tanjunganom	PUSKESMAS TANJUNGANOM	Tanjunganom
38	Wilangan	PUSKESMAS WILANGAN	Desa Mancon

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan Pelayanan KB. Tabel diatas menjelaskan tentang gambaran sebaran fasilitas kesehatan yang membantu dalam proses pelayanan KB yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pelayanan yang dapat dilayani oleh pihak rumah sakit adalah untuk pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW). Sedangkan pada faskes melayani dalam hal pemasangan IUD, Implan dan suntik.

Secara data dapat dijelaskan bahwa Jumlah fasilitas kesehatan sudah cukup memadai untuk melakukan pelayanan KB. Disamping Faskes diatas, ada salah satu Fasilitas kesehatan mobile yang disebut dengan Mobil pelayanan KB (Muyan KB). Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan KB sering melakukan pelayanan secara rutin ke beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.6

Tabel Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD s.d Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KADER		JUMLAH KADER
			PPKBD	SUB PPKBD	
1	BAGOR	21	21	242	263
2	BARON	11	11	260	271
3	BERBEK	19	19	253	272
4	GONDANG	17	17	198	215
5	JATIKALEN	11	11	139	150
6	KERTOSONO	14	14	198	212
7	LENGKONG	16	16	144	160
8	LOCERET	22	22	344	366
9	NGANJUK	15	15	398	413
10	NGETOS	9	9	127	136
11	NGLUYU	6	6	63	69
12	NGRONGGOT	13	13	252	265
13	PACE	18	18	417	435
14	PATIANROWO	11	11	164	175
15	PRAMBON	14	14	229	243
16	REJOSO	24	24	295	319
17	SAWAHAN	9	9	330	339
18	SUKOMORO	12	12	166	178
19	TANJUNGANOM	16	16	529	545
20	WILANGAN	6	6	128	134
JUMLAH		**284**	**284**	**4.876**	**5.160**

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana (KB) di tingkat desa/kelurahan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Lima tahun terakhir ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah melakukan perbaikan dari sisi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pencapaian tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
			2022		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	*Total Fertility Rate* (TFR)/Total Angka Kelahiran	100	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	1,96	1,88	1,83	1,73	102,04	106,38	109,29	115,61
2	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	100	80,03	-	80,00	80,01	80,02	80,03	78,66	79,36	78,46	78,17	98,32	99,19	98,05	97,68
3	Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun	100	-	-	11,60	11,50	-	-	10,92	7,833	-	-	106,23	146,81	-	-
4	Prosentase Keluarga Ber-KB yang Mengikuti kelompok Kegiatan	100	-	-	-	-	87,00	88,00	-	-	76,54	81,29	-	-	87,97	92,38
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	100	11,60	-	11,75	11,70	11,65	11,60	9,64	9,20	9,66	10,05	121,89	127,22	120,60	115,42

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya sampai Tahun 2022

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No.	PROGRAM	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.063.650	302.105.904	-	-	442.654.747	286.562.521	-	-	89,78	94,85	-	-	(0,39)	(0,35)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575.000.000	279.271.200	-	-	562.838.321	275.780.100	-	-	97,88	98,75	-	-	(0,51)	(0,51)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.400.000	1.650.000	-	-	4.400.000	1.650.000	-	-	100	100	-	-	(0,63)	(0,63)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39.425.000	3.300.000	-	-	34.616.800	2.300.000	-	-	87,80	69,70	-	-	(0,92)	(0,93)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	14.911.000	-	-	100	99,41	-	-	0,00	(0,01)
6	Program Pelayanan Kontrasepsi	550.000.000	-	-	-	503.500.700	-	-	-	91,55	-	-	-	(1,00)	(1,00)
7	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	450.450.000	-	-	-	418.433.050	-	-	-	92,89	-	-	-	-	-
8	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	279.900.000	-	-	-	279.273.100	-	-	-	99,78	-	-	-	-	-
9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	70.000.000	-	-	-	69.131.000	-	-	-	98,76	-	-	-	-	-
10	Program Pendukung Operasional KB	7.098.632.000	-	-	-	4.465.032.801	-	-	-	62,90	-	-	-	-	-
11	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	5.921.250.000	-	-	-	5.335.055.600	-	-	-	90,10	-	-	-	-	-
12	Program Keluarga Berencana	-	2.213.377.000	-	-	-	1.521.649.098	-	-	-	68,75	-	-	-	-
13	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	-	6.383.864.500	-	-	-	5.803.024.753,8	-	-	-	90,90	-	-	-	-
14	Program Ketahanan Keluarga	-	2.084.557.000	-	-	-	1.263.818.400	-	-	-	60,63	-	-	-	-
		15.497.120.650	**11.283.125.604**	**-**	**-**	**12.129.936.119**	**9.169.695.872,8**	**-**	**-**	**78,27**	**81,27**	**-**	**-**	**(0,27)**	**-**

No.	PROGRAM	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SESUDAH PERUBAHAN														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.230.262.550	5.498.600.160	-	-	4.042.537.997,07	5.238.934.903	-	-	95,56	95,28	0,30	0,30
	Program Pengendalian Penduduk	-	-	103.082.000	298.015.000	-	-	92.324.900	293.056.379	-	-	89,56	98,34	1,89	2,17
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	11.608.338.200	8.121.516.420	-	-	8.988.210.158,33	7.968.328.647	-	-	77,43	98,11	(0,30)	(0,11)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	1.223.831.550	5.429.600.750	-	-	591.660.600	4.453.240.196	-	-	48,34	82,02	3,44	6,53
		-	**-**	**17.165.514.300**	**19.347.732.330**	**-**	**-**	**13.714.733.655,40**	**17.953.560.125**	-	-	**79,90**	**92,79**	**0,13**	**0,31**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 s/d Tahun 2022 dapat dianalisis bahwa Target Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah tercapai dengan Kategori Tinggi.

Sedangkan berdasarkan Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 s/d Tahun 2022 dapat dianalisis bahwa Pagu Anggaran yang telah ditetapkan bisa terealisasi maksimal dan termasuk dalam Kategori Tinggi.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari Koordinasi dengan Pihak/Instansi terkait dan adanya Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) kepada Masyarakat serta Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Penguatan SDM dan Sistem Pelaporan sehingga semua Kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat guna tercapainya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam pemberian Pelayanan KB dan Pendampingan Keluarga adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, TNI, POLRI, IBI, PKK, Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).

Dalam upaya pemberian layanan Edukasi terkait Kesehatan Reproduksi dan Kesiapan Pra Nikah Dinas PPKB bermitra dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya partisipasi KB Pria (MOP)	Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP	Minimnya pengetahuan laki-laki terhadap informasi Pelayanan KB Pria, dan Kesehatan Reproduksi pasca melakukan KB MOP.
2.	Masih Tingginya ummeet need	Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) tidak ber-KB perlu pembinaan menjadi Peserta KB	- Karena masalah kesehatan. - Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat). - Takut efek samping pasca Pelayanan KB. - Terlalu tua. - Tidak subur. - Kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi.
3.	Masih terdapat Keluarga Beresiko Stunting yang perlu mendapat pendampingan	Masih Tingginya Angka Stunting	- Belum maksimalnya Pendampingan bagi keluarga yang beresiko Stunting. - Kurangnya Asupan gizi dan nutrisi dalam mencukupi kebutuhan anak. - Pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. - Buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Keterlambatan dalam pengumpulan data KB dari Koordinator Wilayah	Adanya Keterbatasan daya dukung dalam validasi data BANGGA KENCANA	Kurangnya Kapasitas SDM dan Kestabilan Sistem Informasi Pusat
5.	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terkait KB	Muatan dan Pesan dalam Penyampaian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih perlu untuk terus dikembangkan	Pengembangan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum optimal
6.	Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum optimal	Kurangnya Integrasi dengan Lintas Sektor	- Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas). - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) - Kurang optimalnya koordinasi antar lintas sektoral.
7.	Kurangnya Pengetahuan terkait Isu-Isu Kependudukan	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum optimal	- Kurangnya pengetahuan siswa pada masalah-masalah Kependudukan terutama kualitas penduduk usia Produktif di kalangan remaja. - Kurangnya Kepedulian pada isu kependudukan sehingga belum terbentuk perilaku-perilaku peduli kependudukan mulai dari keluarga.

Faktor penghambat ataupun Faktor pendorong yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditinjau dari Telaahan Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur 2020-2024 dan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 2020-2024.

- **Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2020-2024, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"** dengan 9 (sembilan) misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

1) Pembangunan Keluarga :

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait "Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga" dan "Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilainilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga". Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan

masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2) Kependudukan:

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional". Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya "Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan".

3) Keluarga Berencana (KB):

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya "Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi".

- **Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.**

Visi BKKBN saat ini adalah **"Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Dengan misi sebagai berikut :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.

5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

- **Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026**

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah "Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk" dengan mengintervensi Jumlah kelahiran yang dijabarkan dalam Sasaran "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas".

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dengan Pusat sudah terintegrasi dan berjalan secara sinergi. Dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di daerah. Sehingga strategi, arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai dapat bersinergi dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Peran penting dalam pengukuran program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Program Pengendalian Penduduk
   - Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi.
   - Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   - Persentase Peserta KB Aktif.
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
   - Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R).
   - Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 tahun.

- **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) merupakan sebuah kajian dan wacana yang diberikan kepada para pemangku kebijakan guna menentukan kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan yang berorientasi kepada konsep tata ruang dan tata wilayah serta memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu telaahan RTRW dan KLHS dalam menunjang perencanaan pembangunan sangat diperlukan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam nawa cita program Jokowi-JK yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia kemudian di perjelas dalam Program Nasional KKB di daerah tertinggal, terpencil dan terbatas (Galcitas) dan di daerah kumuh miskin, pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, bidang ini difokuskan pada upaya penggerakan akseptor untuk mengikuti dan mensukseskan program KB.

Pada Bidang Keluarga Berencana, difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong pasangan usia subur (PUS) memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penggarapan KB di wilayah pedesaan yang sulit terjangkau sifatnya wajib karena memberikan keadilan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat pada wilayah lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya upaya maksimal dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemerataan pelayanan KB.

Sedangkan pada bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diupayakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk tetap menjadi peserta KB aktif dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan Pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), BKB, BKR dan BKL yang bekerja sama dengan lintas sektor (Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) serta berupaya mensosialisasikan program KB melalui GenRe Generasi Berencana yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang

pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Adapun Faktor penghambat dan pendukung berdasarkan Tata Ruang dan KLHS adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDL).

Faktor Pendukung :

1. Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan jumlah desa sebanyak 284 desa/ kelurahan dan masih sarat dengan kultur rasa gotong royong dan kepedulian yang masih tinggi, membuat masyarakat berkenan untuk turun tangan guna membantu petugas dalam melakukan sosialisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya wilayah pedesaan di Kabupaten Nganjuk, membuat ciri khas masyarakat desa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi dan kekerabatan yang baik dengan orang di sekitar masih sangat kental.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) namun di berbagai bidang masih belum optimal. Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024-2026 mendatang terdapat beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Penguatan SDM, Sistem Informasi dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
3. Inovasi peningkatan kepesertaan KB melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Lembaga terkait lainnya untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan kriteria penentuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan di capai melalui Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berlandasarkan hasil visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat, tepatnya pada misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan" yang dijabarkan ke dalam tujuan "Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk" dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran.

4.2. Sasaran

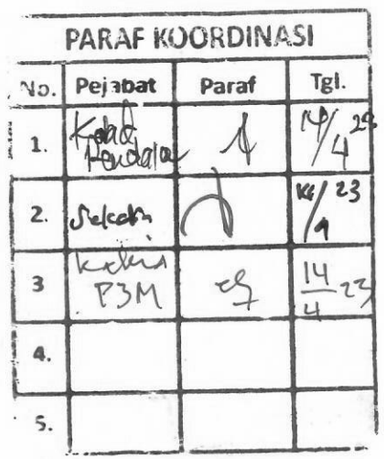
Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan "Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk". Dijabarkan dalam Sasaran "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas".

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	-	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,66	0,35	0,33	0,33
		Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	1. Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Anak	1,73	2,00	2,00	2,00
			2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	%	78,17	80,05	80,06	80,07
			3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	%	10,05	11,40	11,30	11,20

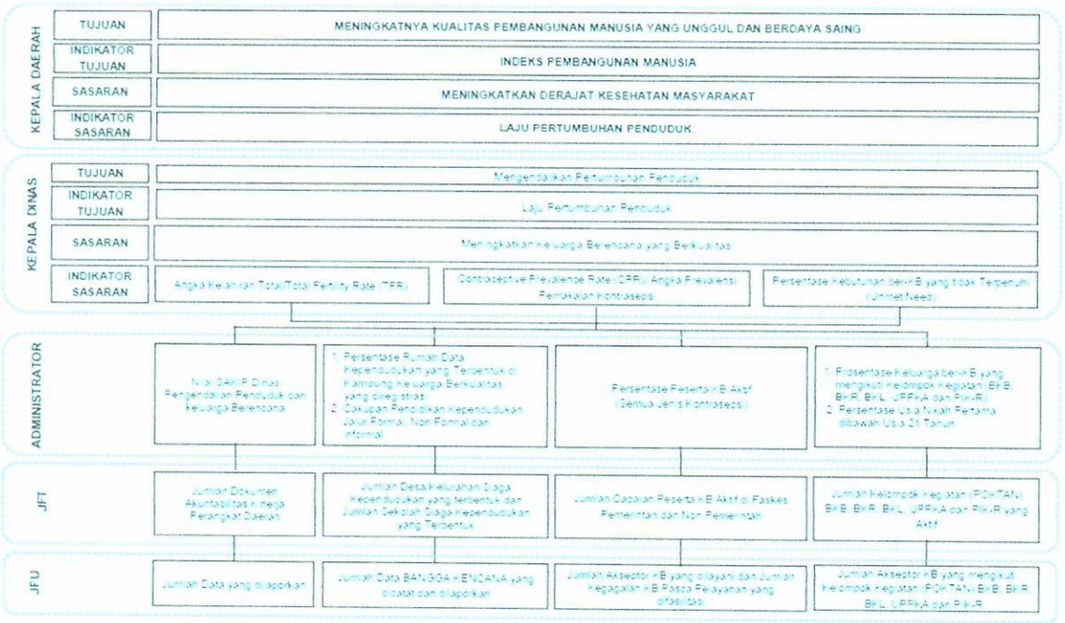


PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	Sekretaris		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

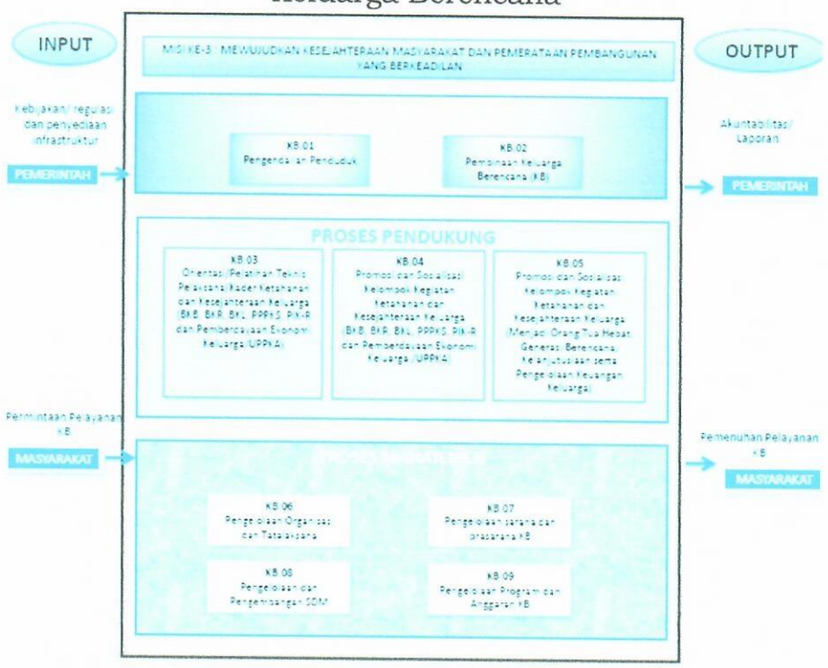
4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

Berikut ini kami sajikan Cascading dan Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

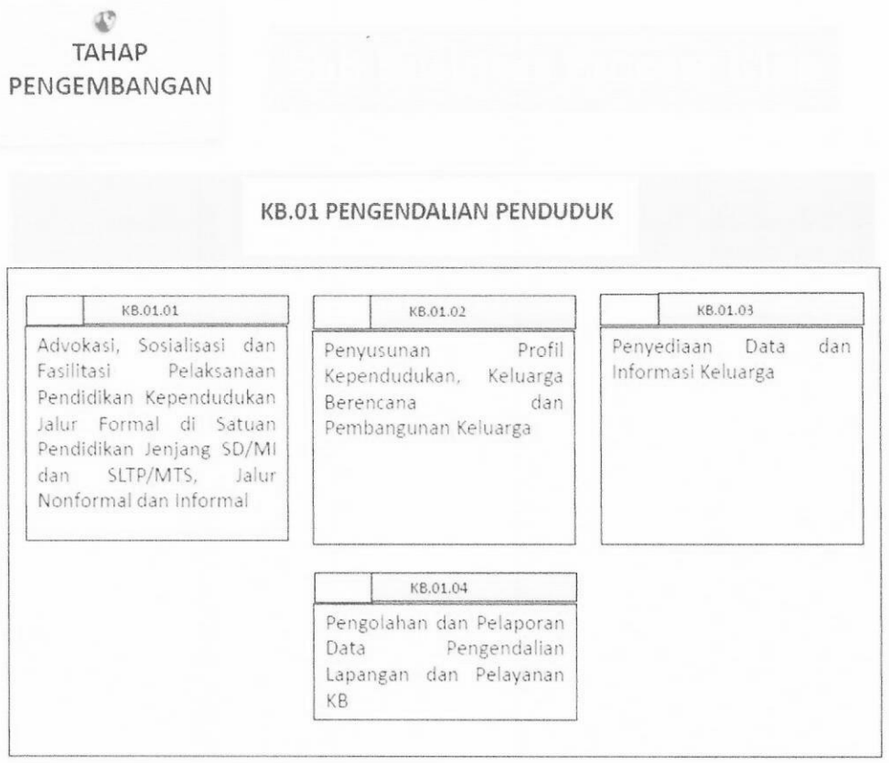
Gambar 4.1.
Cascading/Pohon Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



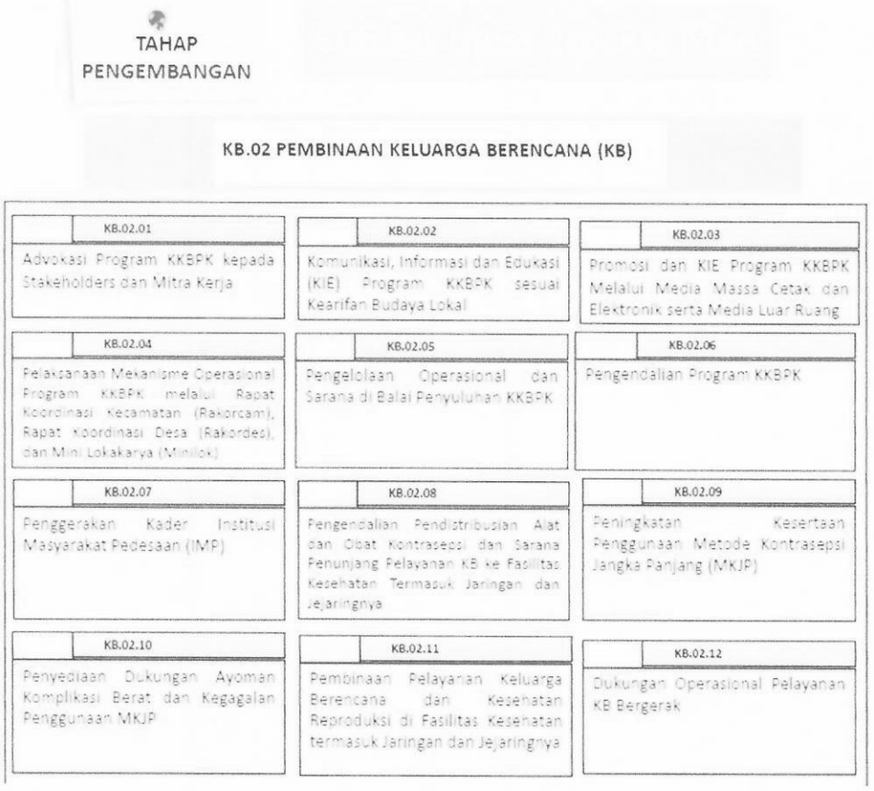
Gambar 4.2.
Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



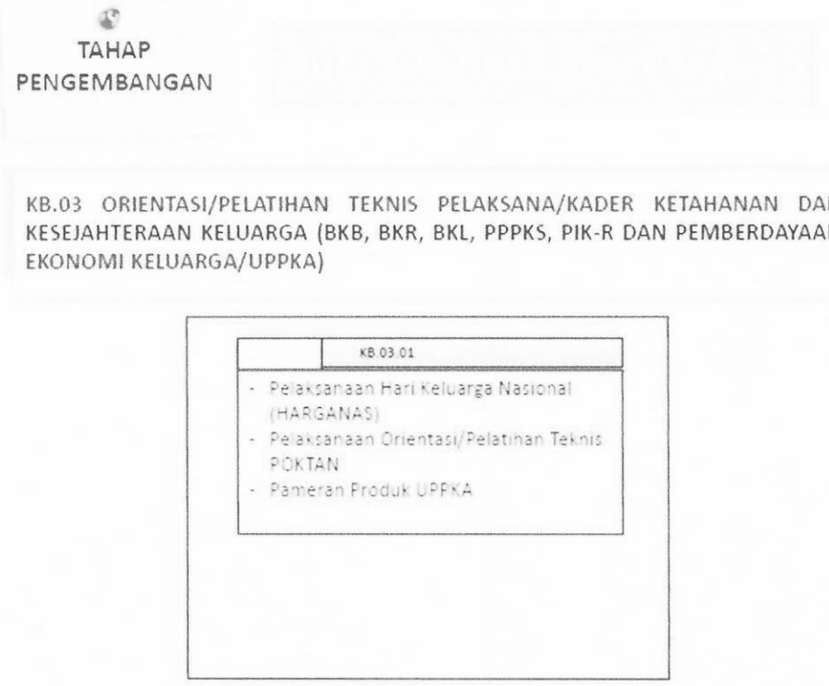
Gambar 4.3.
Proses Bisnis KB.01 Pengendalian Penduduk



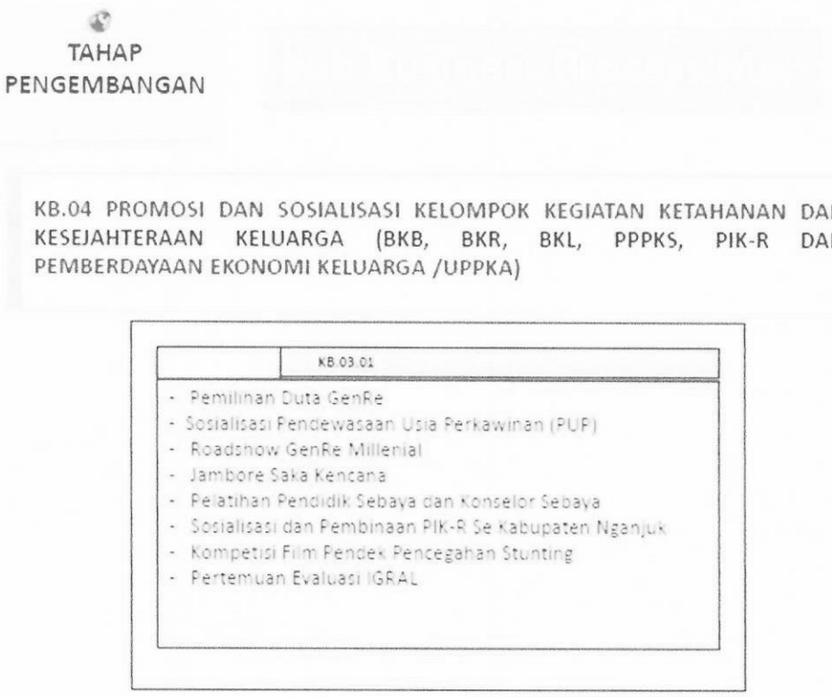
Gambar 4.4.
Proses Bisnis KB.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



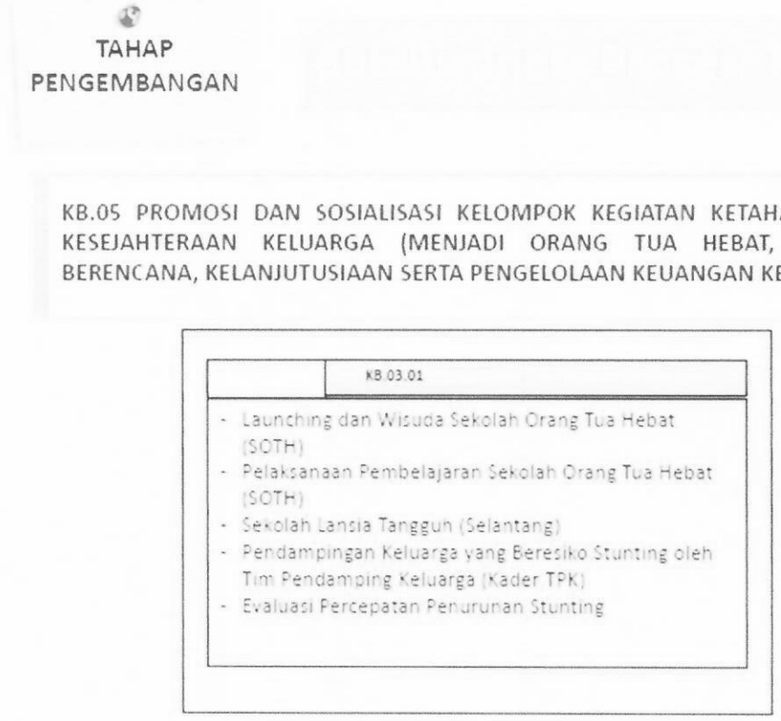
Gambar 4.5.
Proses Bisnis KB.03 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)



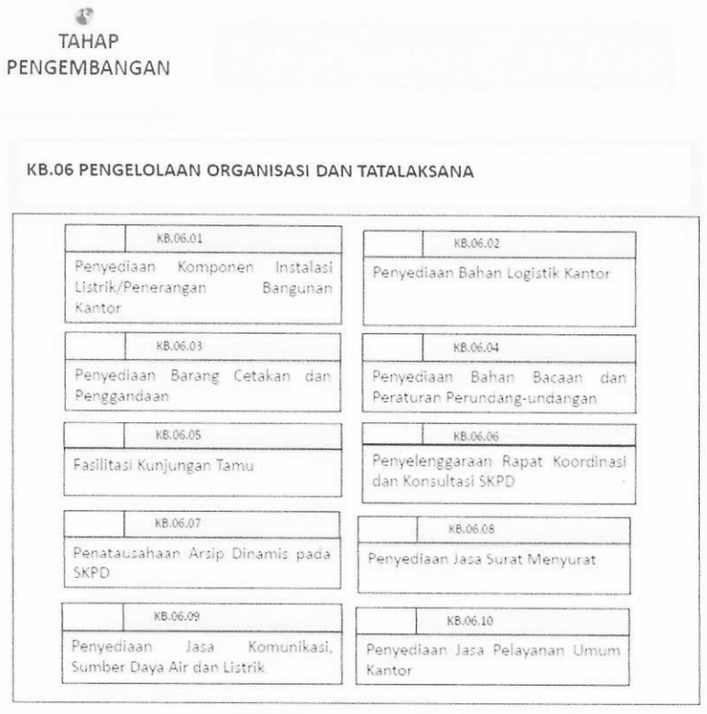
Gambar 4.6.
KB.04 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)



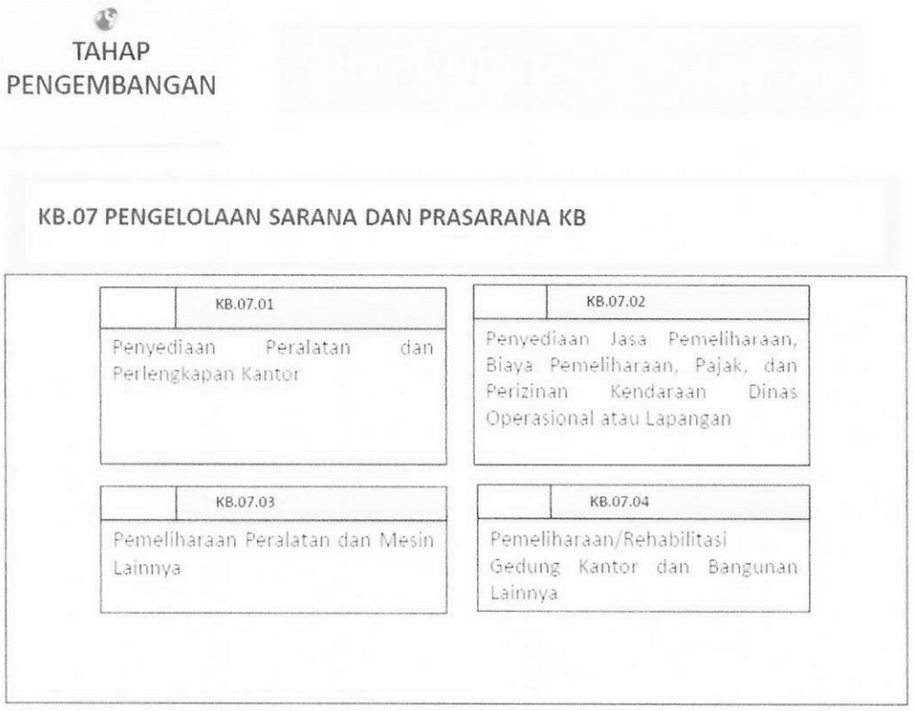
Gambar 4.7.
Proses Bisnis KB.05 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)



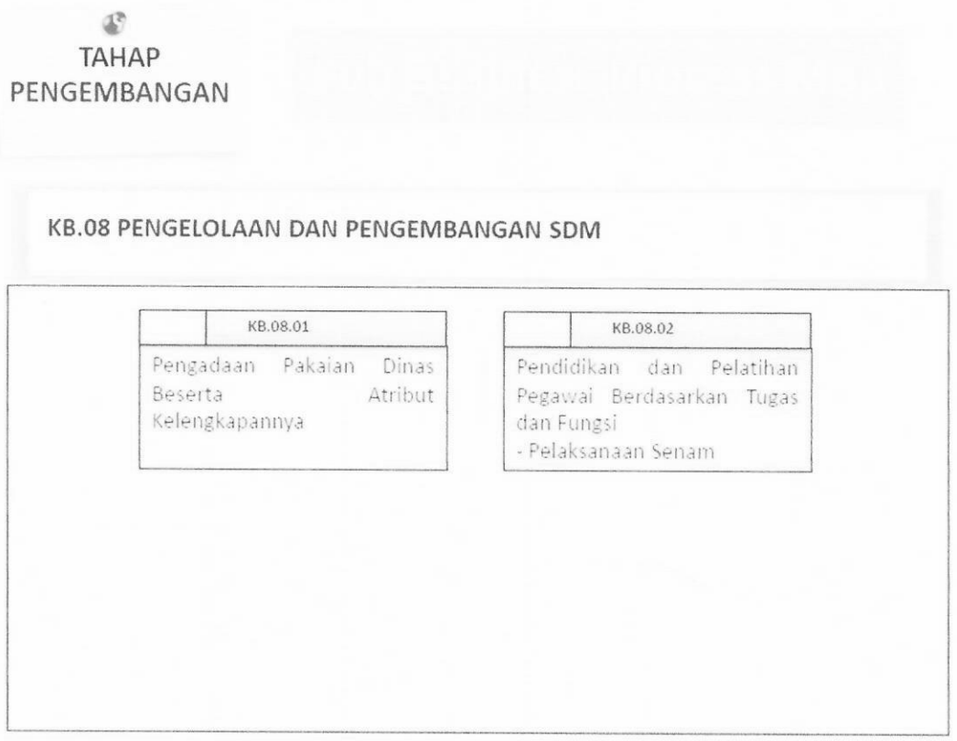
Gambar 4.8.
Proses Bisnis KB.06 Pengelolaan Organisasi Dan Tatalaksana



Gambar 4.9.
Proses Bisnis KB.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana KB



Gambar 4.10.
Proses Bisnis KB.08 Pengelolaan dan Pengembangan SD



Gambar 4.11.
Proses Bisnis KB.09 Pengelolaan Program dan Anggaran KB

TAHAP
PENGEMBANGAN

KB.09 PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KB

KB.09.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KB.09.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KB.09.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
KB.09.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KB.09.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	KB.09.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KB.09.08 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KB.09.09 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KB.09.10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

Berikut kami sajikan Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	1 Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga :	1 Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :
		a. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	a. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
		b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal atau melalui kelompok kegiatan	b. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
		c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi	c. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan
		d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi	d. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah
		e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
		f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang kependudukan	

Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	
		h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	
		i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi melalui: - Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan - Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat - Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur	
		2. Bidang Keluarga Berencana :	2 Revitalisasi Program KB :
		a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP	a. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
		b. Peningkatan kesertan KB Pria	b. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB

Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan swasta	c. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
		d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB	d. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
		e. Ketersediaan alokon di masing-masing faskes Pemerintah dan Swasta	e. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB
		f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaan BPJS (Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya	f. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
		g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik Pemerintah maupun Swasta	g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2
		h. Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok Unmet need (PUS belum KB)	h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
		i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, dan masyarakat peduli KB	i. Meningkatkan Pembinaan dan Kompetensi Kader KB
		j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak(KHIBA) melalui KB	

Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder	
		l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS.	
		m. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program KKBPK di Kampung KB.	
		3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :	3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
		a. Mempertajam segmentasi sasaran kelompok Tribina dan UPPKA	a. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok
		b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi program	b. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
		c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah pada pencapaian sasaran	c. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga
		d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program generasi	d. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapngan

Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		berencana	untuk menunjang program
		e. Pendewasaan Usia Perkawinan	
		f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera	
		g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga	

- Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan bersama tentang kebijakan umum pembangunan untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berikut adalah kebijakan umum pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 :

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP.
4. Meningkatkan kesertaan ber KB.
5. Meningkatkan kualitas petugas KB.
6. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas.
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas" ditetapkan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Adapun program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator program (outcome), indikator kegiatan (output) dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk disajikan dalam tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									20.024.734.000		**19.405.875.500**		**19.888.833.000**		**59.319.442.500**		
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	**Meningkatkan Keluarga Berencana yang berkualitas**	**1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) 2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)**	**2 14 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Nilai**	**77,40 Nilai**	**82 Nilai**	**9.098.774.000**	**84 Nilai**	**7.924.225.500**	**86 Nilai**	**8.094.033.000**	**86 Nilai**	**25.117.032.500**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**11**	**11**	**15.020.000**	**11**	**16.522.000**	**11**	**18.129.500**	**33**	**49.671.500**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3.670.000	3	4.037.000	3	4.400.000	9	12.107.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	3.900.000	4	4.290.000	4	4.715.000	12	12.905.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	7.450.000	4	8.195.000	4	9.014.500	12	24.659.500	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**22**	**22**	**4.787.004.000**	**22**	**4.856.191.000**	**22**	**4.924.273.500**	**66**	**14.567.468.500**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	31	31	4.780.294.000	31	4.849.161.000	31	4.916.893.500	93	14.546.348.500	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	3.210.000	5	3.530.000	5	3.880.000	15	10.620.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	15	10.500.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**2**	**152.000.000**	**2**	**159.062.500**	**2**	**167.500.000**	**6**	**478.562.500**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	22.000.000	1	24.062.500	1	27.500.000	3	73.562.500	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31	31	130.000.000	31	135.000.000	31	140.000.000	93	405.000.000	Sekretariat	Dalam Daerah dan Luar Daerah Nganjuk
			2 14 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**31**	**33**	**709.250.000**	**33**	**737.450.000**	**33**	**745.980.000**	**99**	**2.192.680.000**	**Sekretariat**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendata		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	70.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	3	213.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	11.500.000	1	11.950.000	1	12.500.000	3	35.950.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	8.250.000	4	8.500.000	4	8.780.000	12	25.530.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	11	11.000.000	11	12.000.000	11	13.200.000	33	36.200.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	250.000.000	12	275.000.000	12	280.000.000	36	805.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	6	10.500.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	-	**3**	**1.350.000.000**	-	-	-	-	**3**	**1.350.000.000**	**Sekretaris**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**
			2 14 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	3	1.350.000.000	-	-	-	-	3	1.350.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**36**	**36**	**915.000.000**	**36**	**960.750.000**	**36**	**1.010.000.000**	**108**	**2.885.750.000**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	36	37.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	130.000.000	12	135.000.000	12	140.000.000	36	405.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	775.000.000	12	813.750.000	12	855.000.000	36	2.443.750.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**unit**	**92**	**92**	**1.170.500.000**	**97**	**1.194.250.000**	**102**	**1.228.150.000**	**291**	**3.592.900.000**	**Sekretariat**	
			2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	81	81	185.000.000	81	190.500.000	81	195.500.000	243	571.000.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendalla		14/4
2.	Sekolin		14/4
3	Kabid P3M		14/4
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	75.000.000	15	78.750.000	20	82.650.000	45	236.400.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	1	910.500.000	1	925.000.000	1	950.000.000	3	2.785.500.000	Sekretariat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi**	**%**	**70,00%**	**84,29%**	**593.000.000**	**92,00%**	**620.500.000**	**98,75%**	**650.500.000**	**98,75%**	**1.864.000.000**	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga**	
					Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	**Sekolah Siaga Kependudukan**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**127.285.000**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**129.150.000**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**134.765.000**	**9 Sekolah Siaga Kependudukan**	**391.200.000**		
			2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Kegiatan**	**-**	**9**	**127.285.000**	**12**	**129.150.000**	**15**	**134.765.000**	**36**	**391.200.000**	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga**	
			2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	-	3	54.220.000	4	55.000.000	5	57.400.000	12	166.620.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Nganjuk
			2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	-	3	55.915.000	4	57.000.000	5	59.200.000	12	172.115.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Nganjuk
			2 14 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan	-	3	17.150.000	4	17.150.000	5	18.165.000	12	52.465.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Nganjuk
			2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**Laporan**	**24**	**26**	**593.000.000**	**26**	**620.500.000**	**26**	**650.500.000**	**78**	**1.864.000.000**	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga**	
			2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 02 2.02 05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kendala		14/4 23
2.	Sekbid		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	-	12	148.650.000	12	150.500.000	12	165.500.000	36	464.650.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Data	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12	269.350.000	12	295.000.000	12	310.000.000	36	874.350.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif**	**%**	**78,17%**	**80,05%**	**9.632.960.000**	**80,06%**	**10.091.150.000**	**80,07%**	**10.297.300.000**	**80,07%**	**30.021.410.000**	**Bidang Keluarga Berencana**	
			2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kegiatan**	**6**	**6**	**527.450.000**	**6**	**544.000.000**	**6**	**557.300.000**	**18**	**1.628.750.000**	**Bidang Keluarga Berencana**	
			2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Advokasi KIE dan Penggerakan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Advokasi KIE dan Penggerakan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	6	6	352.450.000	6	365.000.000	6	375.800.000	18	1.093.250.000	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Nganjuk
			2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Keluarga Berencana	Dinas PPKB Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendalin		14/4/23
2.	Sekdin		19/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Keluarga Berencana	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	9	1	175.000.000	1	179.000.000	1	181.500.000	3	535.500.000	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Nganjuk
			2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**Orang**	**5160**	**5160**	**7.500.000.000**	**5160**	**7.875.000.000**	**5160**	**7.988.550.000**	**15480**	**23.363.550.000**	**Bidang Keluarga Berencana**	
			2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	5160	5160	7.500.000.000	5160	7.875.000.000	5160	7.988.550.000	15480	23.363.550.000	Bidang Keluarga Berencana	Kecamatan di Kabupaten Nganjuk
			2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**Orang**	**141.410**	**140.000**	**1.005.510.000**	**145.000**	**1.012.150.000**	**150.000**	**1.025.450.000**	**435.000**	**3.043.110.000**	**Bidang Keluarga Berencana**	
			2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	17.160.000	12	17.650.000	12	18.100.000	36	52.910.000	Bidang Keluarga Berencana	Fasilitas Kesehatan KB
			2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	141.410	140.000	974.600.000	145.000	980.000.000	150.000	991.500.000	435.000	2.946.100.000	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Nganjuk
			2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	5	2	13.750.000	2	14.500.000	2	15.850.000	6	44.100.000	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Nganjuk
			2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Keluarga Berencana	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Keluarga Berencana	Dinas PPKB Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaru		14/4/23
2.	Sekdis		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**Kampung KB**	**49**	**49**	**600.000.000**	**49**	**660.000.000**	**49**	**726.000.000**	**147**	**1.986.000.000**	**Bidang Keluarga Berencana**	
			2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	49	49	600.000.000	49	660.000.000	49	726.000.000	147	1.986.000.000	Bidang Keluarga Berencana	Kecamatan di Kabupaten Nganjuk
			2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)**	**%**	**81,29%**	**89,01%**	**700.000.000**	**89,02%**	**770.000.000**	**89,03%**	**847.000.000**	**89,03%**	**2.317.000.000**	**Bidang Pembangunan Keluarga**	
					2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	**%**	**7,51%**	**10,20%**	**410.000.000**	**10,10%**	**415.500.000**	**10,00%**	**420.500.000**	**10,00%**	**1.246.000.000**		
			2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kelompok Kegiatan**	**5**	**5**	**1.110.000.000**	**5**	**1.185.500.000**	**5**	**1.267.500.000**	**15**	**3.563.000.000**	**Bidang Pembangunan Keluarga**	
			2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Unit	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peningkatan dan Pemberdayaan Mitra Kerja Kelompok Kegiatan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Orang	50	50	350.000.000	60	385.000.000	70	423.500.000	180	1.158.500.000	Bidang Pembangunan Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk
			2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kader	30.252	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pembangunan Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1	Kabid Rendalev		19/4 23
2	Sekretaris		19/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4			
5			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Laporan	5	5	410.000.000	6	415.500.000	7	420.500.000	18	1.246.000.000	Bidang Pembangunan Keluarga	Kabupaten Nganjuk
			2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	-	4	350.000.000	6	385.000.000	8	423.500.000	18	1.158.500.000	Bidang Pembangunan Keluarga	Kabupaten Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No	Perangkat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator kinerja pada dokumen ini terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja kunci (IKK).

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Rentsra	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total	1,73	2,00	2,00	2,00	2,00
2.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	78,17	80,05	80,06	80,07	80,07
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,05	11,40	11,30	11,20	11,20

Berdasarkan matrik yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di dalam perencanaan Kinerja Dinas PPKB merupakan hasil review dari isu-isu strategis terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diakomodir dalam matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari Dinas PPKB dapat terwujud.

Melihat beberapa indikator diatas dapat kita jabarkan bahwa untuk urusan Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya menekan jumlah angka kelahiran melalui program KB dan untuk urusan Keluarga Berencana berfokus pada prevalensi pemakaian alat kontrasepsi. Indikator tersebut memberikan gambaran bahwa perencanaan kinerja yang dilaksanakan telah berbasis kepada isu strategis dan telah berbasis pada kinerja.

Berikut penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR).
   TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Prosentase capaian peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
   Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang

tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak.

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa Indikator kinerja difungsikan sebagai alat ukur yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengukur 2 urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan urusan Keluarga Berencana. Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan tujuan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	1,73	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	78,17	80,05	80,06	80,07	80,07
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	10,05	11,40	11,30	11,20	11,20

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001